

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan komponen penting dalam dinamika perpolitikan suatu bangsa. Partai politik dianggap sebagai salah satu cara atau “kendaraan” seseorang atau sekelompok individu untuk mencapai kekuasaan. Begitu juga di Indonesia, partai politik berkembang dan menjadi alat untuk menjembatani para elit politik untuk mencapai kekuasaan politik dalam negara. Biasanya partai politik adalah organisasi yang mandiri dalam finansial, memiliki haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan ikut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Dalam partai politik terdapat struktur partai yang terdiri atas tingkat pusat, wilayah, kota atau kabupaten, cabang, ranting, hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing tingkatan kepengurusan tersendiri terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Dalam partai politik kedudukan kepengurusan tertinggi berada pada ketua, sekretaris, dan bendahara atau biasa disebut pengurus inti. Selain itu, partai politik biasanya memiliki organisasi sayap partai yang dibentuk secara khusus berbasis segmentasi susunan masyarakat Indonesia. Organisasi sayap partai dibentuk sesuai dengan kebutuhan partai, sekaligus berfungsi sebagai sumber kader partai.

Partai “X” adalah sebuah partai politik yang dideklarasikan pada tahun 2014. Partai ini termasuk partai baru dalam dunia perpolitikan Indonesia, dengan visi dan misi untuk

mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa Partai “X” telah lolos verifikasi dan sudah resmi menjadi partai peserta pemilihan umum (Pemilu) pada periode mendatang. Partai “X” memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap pengurus di tiap tingkatan seperti tugas-tugas administrasi atau pemberkasan data kepengurusan, membentuk struktur kepengurusan sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan eksistensi Partai “X” khususnya di Kota Bandung, serta mengumpulkan anggota atau simpatisan yang *loyal* pada Partai “X”. Selain itu, Partai “X” harus melakukan penjangkaran dan seleksi calon anggota legislatif serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Di Partai “X” susunan tingkat kepengurusan dibedakan menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang merupakan kepengurusan tingkat pusat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) merupakan kepengurusan tingkat wilayah/provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) merupakan kepengurusan tingkat kota/kabupaten, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) merupakan kepengurusan tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) merupakan kepengurusan tingkat kelurahan. Setelah semua tingkat kepengurusan dibentuk akan dilakukan pelantikan dan diberikan mandat untuk mengerjakan tugas kepartaian dan patuh pada setiap keputusan partai. Berdasarkan AD/ART Partai “X”, ikatan masa jabatan kepengurusan Partai “X” adalah satu periode (lima tahun). Namun, dikarenakan belum diadakannya kongres pada tingkat nasional, pemilihan ketua beserta pengurusnya belum bisa dilaksanakan sehingga penentuan ketua beserta pengurusnya berupa mandat atau penunjukkan.

Adapun penelitian ini akan difokuskan pada kepengurusan Partai “X” tingkat kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai “X”

Kota Bandung telah membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Bandung yaitu 30 kecamatan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang merupakan kepengurusan tingkat kecamatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Pengurus tertinggi di tingkat kecamatan yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, atau biasa disebut pengurus inti. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang telah diberikan mandat untuk secepatnya membentuk kepengurusan tingkat kelurahan dan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyalurkan program-program unggulan partai kepada masyarakat, mendaftarkan orang-orang di wilayahnya untuk menjadi anggota atau kader partai melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) *online*, membuat program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan eksistensi partai di wilayah tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dituntut menjadi tokoh yang berpengaruh di wilayahnya untuk memperlancar tujuannya di pemilihan legislatif (Pileg) yang akan datang.

Pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” harus melakukan pemberkasan data kepengurusan tingkat kelurahan, Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Kartu Tanda Anggota (KTA) *online*. Selain itu harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan di wilayahnya, memiliki kepekaan dan kepedulian kepada masyarakat khususnya di wilayah kecamatan, dapat berkontribusi pada partai, siap untuk mengumpulkan anggota atau simpatisan yang *loyal* pada Partai “X” untuk memenangkan pemilihan umum yang akan datang dan meningkatkan eksistensi partai di dunia perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) khususnya pengurus inti harus memiliki komitmen serta visi dan misi yang sama dengan Partai “X” dalam menjalankan tugas kepartaian karena mereka yang akan berhadapan langsung dan terjun ke masyarakat membawa nama partai. Dalam menjalankan mesin partai, para pengurus inti Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) akan mengalami beragam persoalan. Sebagai partai yang tergolong baru, mekanisme kepengurusan internal partai seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus. Tekanan masyarakat akan program kerja yang telah terlanjur disosialisasikan melalui media elektronik seringkali tidak dapat direalisasikan sesuai kebutuhan. Adapula benturan-benturan yang terjadi di dalam kepengurusan internal partai sehingga membuat beberapa pengurus inti Dewan Perwakilan Cabang (DPC) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal serta terjadi ‘bongkar pasang’ kepengurusan.

Selama 3 tahun berdirinya partai ini dan terbentuknya kepengurusan tingkat kecamatan atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terjadi perubahan ‘bongkar-pasang’ secara terus-menerus terutama pada jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti yang pasif sering menghindari pertemuan rapat dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan partai. Hal ini dapat memicu pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) lainnya menjadi tidak aktif yang jika diabaikan akan mengakibatkan hilangnya satu per satu anggota partai. Ketika turun ke masyarakat, pengurus inti tidak dapat menyampaikan visi misi partai dan seringkali terbawa arus isu-isu politik yang berkembang sehingga tidak dapat memanfaatkan program partai dengan bijak yang mengakibatkan timbulnya kekecewaan dari masyarakat.

Paparan di atas dikuatkan dengan data administrasi yang diperoleh dari sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai ‘X’ Kota Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2017 terdapat perubahan struktur ketua, sekretaris, dan bendahara di 30 DPC yang ada di Kota Bandung. Perubahan struktural kepengurusan ketua, sekretaris, dan bendahara paling sering terjadi di DPC Rancasari yaitu sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 tahun. DPC Lengkong melakukan perubahan struktural kepengurusan sebanyak 5 kali. DPC Batununggal, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Gedebage, dan Sukajadi melakukan perubahan struktural kepengurusan sebanyak 4 kali. DPC Andir, Arcamanik, Babakan Ciparay, Bandung

Kidul, Bandung Wetan, Cidadap, Cinambo, Cobleng, Kiaracandong, Panyileukan, Sukasari, Sumur Bandung, dan Ujung Berung melakukan perubahan struktural kepengurusan sebanyak 3 kali. DPC Antapani, Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Mandalajati, dan Regol melakukan perubahan struktural kepengurusan sebanyak 2 kali. Perubahan struktural kepengurusan ini terdiri dari perubahan total dimana semua pengurus ketua, sekretaris, dan bendahara dirombak ulang, perubahan posisi antara sekretaris dan bendahara, perubahan sekretaris saja, atau perubahan bendahara saja.

Adapun penyebab terjadinya perubahan struktural karena pengurus inti mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan-alasan yang beragam, diantaranya tidak dapat menjalankan keputusan partai seperti ketika partai sudah memiliki keputusan untuk mendukung calon walikota A, tetapi salah satu pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mendukung calon walikota B, maka hal itu dikatakan sebagai pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan risiko pengurus inti tersebut mengundurkan diri atau dikeluarkan dari struktural dan keanggotaan partai sebagaimana tertuang dalam AD/ART. Selain itu pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas partai seperti pembentukan kepengurusan tingkat kelurahan (ranting), tidak dapat menjalankan program-program partai seperti peyaluran gerobak untuk pedagang, melakukan tindakan pidana seperti penipuan, pemerasan serta hal-hal yang merugikan partai maka pengurus inti tersebut mengundurkan diri atau dikeluarkan.

Perubahan struktural ini tentunya akan menghambat kinerja partai sebagaimana yang telah diprogramkan seperti sosialisasi program unggulan Partai “X” kepada masyarakat, pembentukan kepengurusan tingkat ranting atau kelurahan, membangun citra partai di suatu kecamatan dan juga akan berpengaruh pada data administrasi yang harus dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta pembuatan Surat Keputusan (SK) yang akan diturunkan

oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain itu ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diberhentikan dan ditarik mandatnya oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) karena berlandaskan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengurus yang bersangkutan melanggar norma Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai “X” dan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab partai untuk membuat struktur kepengurusan sampai tingkat ranting atau kelurahan setelah diberi kesempatan dan perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya.

Kondisi yang terjadi di struktural Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” ini mengakibatkan tidak tercapainya target dan tidak terselesaikannya tugas kepartaian yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) misalnya untuk membuat kepengurusan hingga ke tingkat ranting atau tingkat kelurahan, menyosialisasikan program unggulan partai kepada masyarakat untuk meningkatkan eksistensi partai di tingkat kecamatan dan tidak adanya peningkatan pada pendaftaran anggota melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) *online*. Seiring berjalannya waktu terdapat pengurus yang memiliki perubahan visi dan misi terhadap partai sehingga struktur kepengurusan inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus mengalami ‘bongkar-pasang’ secara terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang masih bertahan pada jabatannya sampai saat ini diketahui bahwa para pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bertahan karena menyadari bahwa membesarkan Partai “X” merupakan tanggung jawabnya sebagai pengurus inti, menyadari bahwa melalui Partai “X” dapat lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan membantu masyarakat melalui program-program partai seperti gerobak, ambulans gratis, penyuluhan gizi balita. Pengurus inti menyadari bahwa melalui Partai “X” dapat mengembangkan dirinya dan merasa sudah banyak pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang telah diberikan sehingga tidak mudah

untuk melepas jabatannya begitu saja. Untuk menjaga kondisi agar struktural kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang telah di SK-an berada dalam kepengurusan, memiliki komitmen dalam menjalankan partai, dan memenuhi tanggung jawab akan tugas-tugasnya diperlukan adanya komitmen organisasi.

Paparan di atas apabila merujuk pada teori Meyer & Allen (1997) yang mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Terdapat tiga komponen utama dalam komitmen organisasi, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi (komitmen afektif), pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi (komitmen kontinuan), dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (komitmen normatif). Komitmen afektif adalah sejauhmana pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki hubungan emosional dengan partai, identifikasi dengan partai, dan terlibat dalam semua kegiatan partai. Komitmen normatif adalah sejauhmana perasaan keterikatan pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan partai. Komitmen kontinuan adalah sejauhmana pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyadari kerugian yang akan didapatkan jika meninggalkan partai.

Individu yang memiliki komitmen organisasi yang kuat akan dapat menjalankan tugas kepartaian dengan optimal dan sesuai dengan norma (AD/ART) Partai "X". Pengurus inti dengan komitmen yang kuat akan terus menjadi anggota partai agar apa yang menjadi tujuan masing-masing pengurus inti dapat tercapai. Pengurus inti dengan komitmen yang kuat, akan membantu sesama kader di Partai "X" dalam membangun dan meningkatkan eksistensi partai di masyarakat.

Para pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus memiliki komitmen organisasi yang kuat agar mampu menjalankan mesin partai, sehingga bisa melangkah ke tahap selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat di pemerintahan. Namun kenyataannya tidak semua orang memiliki komitmen organisasi yang sama. Pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” belum memiliki cara yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut agar bisa tetap memiliki komitmen pada Partai “X”.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui bagaimana gambaran komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Memeroleh gambaran komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran mengenai gambaran komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung yang tercermin melalui komitmen afektif, komitemen normatif , dan komitmen kontinuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

- a) Memberikan sumbangan informasi khususnya di bidang Psikologi Industri dan Organisasi mengenai komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung.
- b) Memberi sumbangan informasi kepada peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai komitmen organisasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan informasi kepada pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai “X” sebagai pengajuan untuk melakukan pengembangan diri melalui penyuluhan atau pelatihan (TOT) dalam usaha meningkatkan komitmen pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada partai.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai cara untuk meningkatkan komitmen pengurus terhadap partai.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa Partai “X” lolos verifikasi dan resmi menjadi partai peserta pemilihan umum (Pemilu) dibutuhkan kesiapan para pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab partai, mengumpulkan massa dan simpatisan, serta membesarkan partai di wilayah sekitarnya dalam rangka pemenangan suara baik untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada)

serta pemilihan legislatif (Pileg) Terkadang pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kepartaian dan tidak mengikuti agenda kegiatan partai sehingga terjadi ‘bongkar-pasang’ kepengurusan secara terus menerus. Adapun pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengurus partai seperti tidak menyelesaikan pembentukan kepengurusan tingkat ranting atau kelurahan dan tidak dapat mengaplikasikan program unggulan partai kepada masyarakat. Hal itu menunjukkan pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” tidak memiliki komitmen.

Untuk membantu para pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tetap bertahan dalam kepengurusannya dan dapat membesarkan partai dengan menyelesaikan tanggung jawab maka dibutuhkan adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan psikologis yang mengarakteristikan hubungan antara anggota dan organisasi, serta memiliki implikasi dalam keputusan untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi (Meyer & Allen, 1997). Komitmen organisasi merefleksikan tiga komponen utama yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan.

Komitmen afektif merujuk pada sejauhmana pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menghayati besarnya hubungan emosional terhadap partai, mengidentifikasi dirinya dengan partai pilihannya, dan terlibat dalam kegiatan partai. Para pengurus inti dengan komitmen afektif yang tinggi akan memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk tetap bertahan berada dalam partai sesuai dengan keinginan dirinya (*want*). Pengurus inti berkomitmen di Partai “X” karena merasa nyaman terlibat penuh di partai ini. Pangurus inti juga merasa senang dengan seluruh pengurus DPC yang ada, dan merasa bahwa diri mereka adalah bagian dari keluarga besar Partai “X”. Pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” juga akan menunjukkan betapa penting tanggung jawabnya sebagai ketua, sekretaris, dan

bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta menuntut dirinya untuk memberikan perhatian penuh terhadap partai.

Komitmen normatif, merujuk pada sejauhmana pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki perasaan keterikatan dan kewajiban untuk terus berada dalam partai. Pengurus yang memiliki komitmen normatif yang tinggi, akan terus bertahan menjadi pengurus inti karena merasa dirinya memang sudah seharusnya seperti itu (*ought to*). Para pengurus inti menganggap sosialisasi yang dilakukan ketika baru bergabung dengan partai ini adalah sesuatu yang berharga dan terbentuk kepercayaan akan adanya proses timbal balik yang positif antara pengurus dan partai. Para pengurus inti berkomitmen karena memang sebuah keharusan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah didapatkan di partai ini.

Berikutnya komitmen kontinuan, merujuk pada sejauhmana pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki kesadaran bahwa jika meninggalkan partai, maka akan mengalami kerugian. Para pengurus inti yang memiliki komitmen kontinuan yang tinggi akan terus menjadi pengurus inti karena mereka memiliki kebutuhan (*need*) dan kepentingan di Partai "X". Pengurus inti akan berusaha tetap memertahankan jabatannya karena sudah banyak biaya, waktu, dan tenaga yang diberikan untuk partai serta tidak ada alternatif lain kecuali tetap bertahan dalam Partai "X". Pengurus inti berkomitmen di partai ini karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak akan terpenuhi di partai lain.

Dalam setiap diri individu terdapat ketiga komponen komitmen organisasi dengan derajat yang berbeda-beda. Idealnya, pengurus inti memiliki komitmen afektif, normatif, dan kontinuan yang tinggi, artinya pengurus inti merasa senang dan nyaman berada dalam partai. Pengurus inti berpikir bahwa akan mengalami kerugian jika meninggalkan partai dan merasa wajib untuk terus bertahan dalam partai. Akan tetapi bila pengurus inti memiliki komitmen afektif, normatif, dan kontinuan yang rendah, artinya pengurus inti merasa kurang nyaman

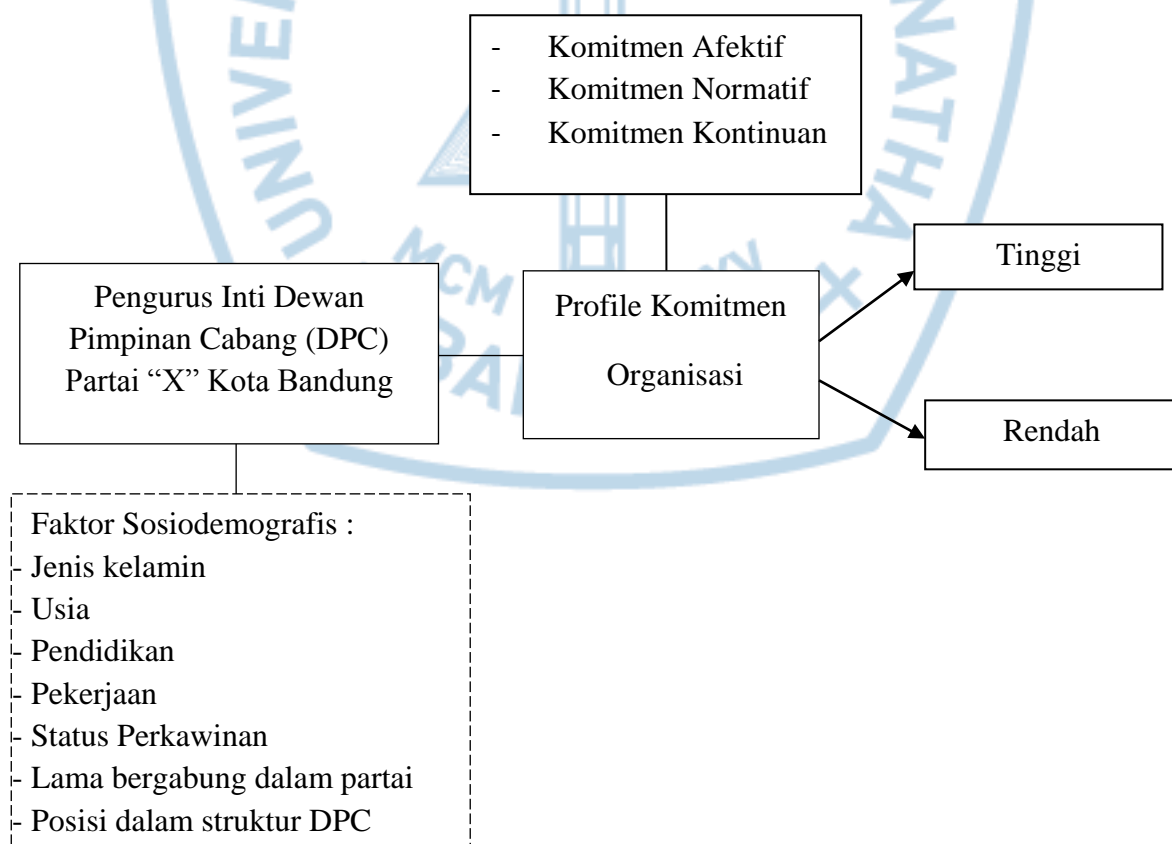
dan tidak merasa menjadi bagian dalam partai. Pengurus inti juga tidak merasa rugi apabila meninggalkan partai dan tidak memiliki tanggung jawab untuk tetap bergabung bersama partai.

Komitmen organisasi tergolong tinggi jika individu memiliki komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan yang tinggi. Komitmen organisasi tergolong rendah jika ketiga komponen komitmen organisasi tergolong rendah atau terdapat salah satu/dua komponen komitmen organisasi yang rendah. Terdapat enam profile komitmen organisasi yang menunjukkan komitmen organisasi rendah yaitu komitmen afektif tinggi, komitmen normatif dan komitmen kontinuan rendah, komitmen normatif tinggi, komitmen afektif dan komitmen kontinuan rendah, komitmen kontinuan tinggi, komitmen afektif dan komitmen normatif rendah, komitmen kontinuan rendah, komitmen afektif dan komitmen normatif tinggi, komitmen afektif rendah, komitmen normatif dan komitmen kontinuan tinggi, komitmen normatif rendah, komitmen afektif dan komitmen kontinuan tinggi.

Komitmen organisasi pada setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor sosiodemografis yang terdiri atas, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, lama bergabung dalam partai dan posisi dalam struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Struktural kengurusan inti di Partai "X" harus terdiri dari 30% keterlibatan pengurus wanita. Di Partai "X" banyak kaum wanita yang memertahankan jabatannya sebagai KSB Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Usia para pengurus inti bermacam-macam, begitu juga dengan riwayat pengalaman organisasi atau partai yang berbeda-beda sehingga pengurus inti bertahan di partai ini karena merasa layak dan mampu mempertahankan jabatannya. Dalam hal pendidikan, komitmen berbanding terbalik, semakin tinggi tingkat pendidikan maka komitmennya semakin rendah (Meyer & Allen, 1997). Karena pada dasarnya orang yang berpendidikan tinggi akan merasa dirinya lebih baik dan mampu, selain itu mereka

mengharapkan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Status perkawinan berpengaruh pada komitmen seseorang. Pengurus yang sudah menikah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sehingga akan mempengaruhi komitmennya terhadap partai. Pengurus akan cenderung mengutamakan urusan “dapur” dengan mencari keuntungan dibandingkan menjalankan intruksi partai.

Seberapa besar komponen komitmen organisasi yang dimiliki oleh pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” akan menentukan tinggi atau rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” sehingga dapat diketahui bagaimana gambaran komitmen organisasi pada pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X”. Hal ini akan tercermin dari komitmen afektif, normatif, dan kontinuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

1.6. Asumsi Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang dipaparkan, berikut adalah asumsi yang dapat dirumuskan :

- 1) Pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” di Kota Bandung menghayati besarnya tanggung jawab yang harus diemban sebagai pengurus partai sehingga membutuhkan komitmen untuk bisa bertahan.
- 2) Komitmen organisasi pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung tercermin melalui komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan yang secara dinamis berkontribusi terhadap tinggi rendahnya komitmen pengurus inti ini terhadap partai.
- 3) Pengurus inti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai “X” Se-Kota Bandung dengan komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan yang tinggi akan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan program kepartaian sekaligus membesarkan nama partai. Demikian pula sebaliknya.